



Spip Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

Firda Millatina

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: firdamillatina628@gmail.com

**Correspondence: firdamillatina628@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk Meningkatkan Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi dalam Mengurangi Terjadinya Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner dengan sampel penelitian adalah aparatur Kantor UKPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis dengan bantuan Aplikasi Statistik berupa Smart PLS 4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi e-procurement berpengaruh positif terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komitmen Organisasi berpengaruh Negatif terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperlemah hubungan antara Implementasi e-procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memperkuat hubungan antara Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Kata kunci: Akuntabilitas Kinerja, Fraud Pengadaan Barang/Jasa, Implementasi e-procurement, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the role of the Government Internal Control System to improve the implementation of e-procurement and organizational commitment in reducing the occurrence of fraud in government procurement of goods and services and its implications for government performance accountability in district/city governments in Banten Province. This research uses primary data in the form of a questionnaire with the research sample being UKPBJ and LPSE office officials in districts/cities in Banten Province who are directly involved in the goods/services procurement process. The sampling technique in this research used the Purposive Sampling method. In this research, the analysis techniques used are validity testing, reliability testing and hypothesis testing with the help of a statistical application in the form of Smart PLS 4. The results of this research prove that the implementation of e-procurement has a positive effect on Fraud in Government Procurement of Goods/Services, Organizational Commitment has a negative effect on Fraud in Government Procurement of Goods/Services, the Government's Internal Control System weakens the relationship between the Implementation of e-procurement and Fraud in Government Procurement of Goods/Services, The Government's Internal Control System strengthens the relationship between Organizational Commitment to Fraud in Government Procurement of Goods/Services, and Fraud in Government Procurement of Goods/Services has a Negative Influence on Government Performance Accountability.

Keywords: Performance Accountability, Fraud in Procurement of Goods/Services, Implementation of e-procurement, Organizational Commitment and Government Internal Control System.

PENDAHULUAN

Secara global, praktik pengadaan barang dan jasa di sektor publik menjadi perhatian utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Putra et al., 2024; Wibowo, 2022). Laporan Transparency International dan World Bank menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan titik

rawan terjadinya korupsi, terutama di negara berkembang. Sistem pengadaan yang lemah, minim transparansi, dan tidak diawasi secara ketat membuka ruang bagi praktik manipulasi, mark-up, dan kolusi yang dapat merugikan negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengadaan menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian vital dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dengan porsi sekitar 43–50% dari total belanja pemerintah. Namun, sektor ini juga menjadi penyumbang terbesar kasus korupsi. Berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga 2022 terdapat 277 kasus korupsi pengadaan yang ditangani. Di Provinsi Banten, kasus seperti pengadaan tanah SMKN 7, pengadaan komputer UNBK, hingga pengadaan masker saat pandemi menunjukkan lemahnya sistem pengendalian dan rendahnya akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat celah besar dalam sistem pengadaan di pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus pada upaya mengurangi fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pendekatan kombinatorik: implementasi e-Procurement, komitmen organisasi, dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Meskipun e-Procurement telah diterapkan secara nasional sebagai bagian dari sistem pengadaan elektronik (SPSE), efektivitasnya dalam mencegah fraud masih dipertanyakan, terutama jika tidak disertai penguatan budaya integritas dan pengawasan internal yang memadai.

Dua penelitian sebelumnya yang relevan mendalami peran e-Procurement, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud pengadaan publik. Mansyuri & Ramadhan (2024) menemukan bahwa penggunaan teknologi e-Procurement, penguatan SPI, kultur etis, dan religiusitas secara signifikan mengurangi fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Dompu Regency. Namun penelitian ini bersifat parsial dan tidak menguji dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja. Sementara Putri et al. (2024) di Jawa Timur mengonfirmasi bahwa efektivitas SPI dan e-Procurement secara langsung mempengaruhi pencegahan fraud dan bahwa budaya etika organisasi memperkuat hubungan ini. Meski demikian, studi tersebut tidak menguji secara kuantitatif dampak fraud pada kinerja pemerintah.

Studi sebelumnya banyak menyoroti peran e-Procurement atau komitmen organisasi secara parsial terhadap fraud, namun belum banyak yang menguji peran moderasi SPIP dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan melihat bagaimana SPIP dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi terhadap pengurangan fraud, serta menganalisis implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel outcome. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (gap) dalam literatur yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Apakah implementasi e-Procurement berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah? (2) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah? (3) Apakah SPIP memoderasi pengaruh implementasi e-Procurement terhadap fraud? (4) Apakah SPIP memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud? (5) Apakah fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah mempengaruhi akuntabilitas kinerja?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah, serta menganalisis peran SPIP sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari fraud terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan sistem pengendalian internal, memperkuat pelaksanaan e-Procurement, dan membangun budaya organisasi yang berkomitmen terhadap pencegahan fraud. Hasilnya juga diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur terkait tata kelola pengadaan, pengendalian internal sektor publik, dan fraud prevention dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi tiga variabel kunci—e-Procurement, komitmen organisasi, dan SPIP—dalam mendorong akuntabilitas kinerja. Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi isu yang sama dengan pendekatan dan konteks yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui pengumpulan data persepsi responden secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan pendekatan sensus, di mana data primer diperoleh langsung dari aparatur yang bekerja di Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan ilmiah yang digunakan bersifat rasional, empiris, dan sistematis, dengan prosedur pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang telah dirancang secara terstruktur.

Penelitian ini menggunakan desain explanatory research, yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel serta pengaruh yang terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012). Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi UKPBJ dan LPSE di seluruh kabupaten/kota serta kantor provinsi di wilayah Banten. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama satu bulan, mencakup tahapan pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di UKPBJ dan LPSE yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mengacu pada Nurlina et al. (2018) dan mencakup: (1) pegawai bersertifikasi pengadaan barang/jasa, (2) pegawai yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam pengadaan, serta (3) pegawai yang menjabat sebagai fungsional pengadaan barang/jasa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui interaksi tanpa perantara. Sumber data utama adalah aparatur pemerintah yang aktif dalam pengadaan barang/jasa pada UKPBJ dan LPSE. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berisi pertanyaan terstruktur yang disusun untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode: (1) penelitian lapangan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama, (2) studi kepustakaan untuk menelaah teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, serta (3) dokumentasi dari sumber tertulis seperti laporan pemerintah, artikel, internet, dan media cetak. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang nantinya akan dianalisis secara statistik, sedangkan studi pustaka dan dokumentasi mendukung penyusunan kerangka teori dan pembahasan hasil.

Penelitian ini terdiri dari lima variabel yang diukur menggunakan skala Likert. Dua variabel dependen yang menjadi fokus utama adalah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja. Fraud dalam pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai tindakan curang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tidak sah selama proses pengadaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Indikator pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Kiswara (2011), yaitu inefisiensi, markup, korupsi, ketidaksesuaian, dan keterlambatan pekerjaan.

Kuesioner disusun dengan menggunakan indikator-indikator yang telah divalidasi dalam penelitian terdahulu dan dikembangkan sesuai konteks organisasi pemerintah daerah. Setiap indikator dirancang untuk memberikan penilaian terhadap persepsi responden dalam skala lima tingkat. Data

Firda Millatina

Sipil Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis dengan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh e-Procurement dan komitmen organisasi terhadap fraud serta peran sistem pengendalian internal dalam memoderasi hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pelaku pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi di wilayah Banten. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung ke sembilan UKPBJ di Provinsi Banten selama periode Oktober hingga Desember 2023. Sebanyak 226 kuesioner disebar (100%), namun hanya 151 kuesioner yang berhasil dikembalikan (67%). Dari jumlah tersebut, 28 kuesioner (12%) tidak dapat diolah karena tidak sesuai dengan kriteria, seperti diisi oleh personil yang tidak memenuhi syarat atau jawaban tidak lengkap. Oleh karena itu, jumlah kuesioner yang valid dan dapat diolah dalam penelitian ini adalah 123 (55%). Pengolahan data dilakukan menggunakan program *Partial Least Square* (PLS) versi 4.0, dengan menggunakan jawaban responden untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas adalah laki-laki sebanyak 82 orang (67%) dan perempuan sebanyak 41 orang (33%), mencerminkan dominasi laki-laki dalam peran pengelola pengadaan di UKPBJ. Dari segi pendidikan, sebanyak 90 responden (73%) merupakan lulusan S1, sementara 33 responden (27%) merupakan lulusan S2. Berdasarkan masa kerja, 63 orang (51%) memiliki pengalaman kerja kurang dari tiga tahun, 13 orang (11%) memiliki masa kerja 3–5 tahun, dan 46 orang (38%) telah bekerja lebih dari lima tahun. Adapun berdasarkan kedudukan fungsional, sebagian besar responden berada pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama sebanyak 68 orang (55%), disusul Jabatan Fungsional Muda sebanyak 44 orang (36%), dan Madya sebanyak 11 orang (9%). Komposisi ini mencerminkan bahwa responden yang terlibat adalah personil yang relevan dan aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah daerah Provinsi Banten.

Analisis Data

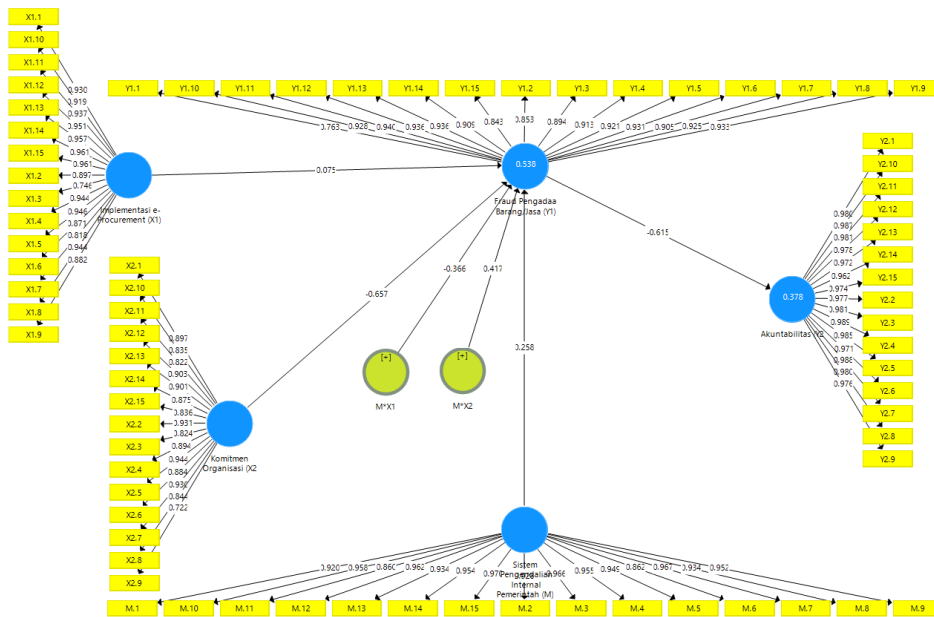
Uji Outer Model (Measurement Model)

Outer model dilakukan untuk menguji hubungan (nilai loading) antara indikator dengan konstruk (variabel laten). Dalam menilai outer model dalam PLS terdapat tiga kriteria, salah satunya adalah melihat convergent validity, sedangkan untuk dua kriteria yang lain yaitu discriminant validity, dalam bentuk square root of average variance extracted (AVE) dan composite reliability telah dibahas sebelumnya pada saat pengujian kualitas data.

Untuk convergent validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/ component score yang diestimasi dengan program

Smart PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk (variabel laten) yang diukur.

Berikut dapat dilihat secara keseluruhan korelasi setiap variabel pada gambar 4.1 yaitu gambar yang menyatakan pengaruh Implementasi e-procurement dan Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal serta implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. Full Model Structural PLS Algorithm

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu Implementasi e-Procurement dengan 15 indikator pertanyaan dan Komitmen Organisasi dengan 15 indikator pertanyaan, 2 variabel dependen yaitu Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan 15 indikator pertanyaan dan Akuntabilitas Kinerja dengan 15 indikator pertanyaan serta variabel moderasi yaitu Sistem Pengendalian Internal dengan 15 indikator pertanyaan.

Uji Hipotesis dengan Inner Model

Inner model menurut Ghozali (2012) merupakan gambaran hubungan antar variabel laten yang berdasarkan pada substantive theory inner model yang terkadang disebut juga dengan inner relation, structural model dan substantive theory. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-Square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen (Ghozali, 2012). Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu ± 1.647 dimana apabila nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel (1.647) maka hipotesis diterima, sebaliknya jika jika nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel (1.647) maka hipotesis ditolak.

Tabel 1. Path Coefficients

Firda Millatina

Sip Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Implementasi <i>e-Procurement</i> (X1) → <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1)	0,075	0,074	0,093	0,809	0,210
Komitmen Organisasi (X2) → <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1)	-0,657	-0,650	0,133	4,928	0,000
SPI (M) * IE (X1) → <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1)	-0,366	-0,349	0,138	2,652	0,004
SPI (M) * KO (X2) → <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1)	0,417	0,399	0,132	3,165	0,001
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1) → Akuntabilitas (Y2)	-0,615	-0,610	0,072	8,602	0,000

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS (2024)

Hubungan antara Implementasi *e-procurement* (X1) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki nilai *p-values* sebesar $0,210 > 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $0,809 < 1,647$ dan nilai koefisien (nilai *original sample*) sebesar $0,075$ menunjukkan arah positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi *e-Procurement* (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1), artinya **H1 ditolak**. Selanjutnya hubungan antara Komitmen Organisasi (X2) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1) memiliki nilai *p-values* sebesar $0,000 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $4,928 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai *original sample*) sebesar $-0,657$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1), artinya **H2 diterima**. Lalu hubungan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Memoderasi Implementasi *e-Procurement* (X1) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1) menunjukkan bahwa nilai *p-values* sebesar $0,004 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $2,652 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai *original sample*) sebesar $-0,366$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah signifikan memperlemah pengaruh Implementasi *e-Procurement* (X1) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1), artinya **H3 ditolak**. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Memoderasi Komitmen Organisasi (X2) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1) memiliki nilai *p-values* sebesar $0,001 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $3,165 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai *original sample*) sebesar $0,417$ menunjukkan arah positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah signifikan memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1), artinya **H4 diterima**. Dan hubungan antara *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y2) berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *p-values* sebesar $0,000 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $8,602 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai *original sample*) sebesar $-0,615$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Y1) berpengaruh negatif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y2), artinya **H5 diterima**.

Tabel 2. R-Square

Firda Millatina

SPIP Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas (Y2)	0,378	0,373
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y1)	0,538	0,519

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS (2024)

Nilai *R-Square* untuk menilai variabel Implementasi *e-Procurement* dan Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal sebesar 0.538 atau 53,8%. Dimana *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dipengaruhi oleh Implementasi *e-Procurement* dan Komitmen Organisasi, sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain. serta menilai variabel *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.378 atau 37,8%. Dimana Akuntabilitas Kinerja dipengaruhi oleh *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa, sisanya sebesar 62,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi e-Procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-values sebesar $0,210 > 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $0,809 < 1,647$ dan nilai koefisien (nilai original sample) sebesar 0,075 menunjukkan arah positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi e-Procurement (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y1). Hal ini berarti H1 ditolak yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Implementasi e-Procurement berpengaruh negatif terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012), Artantri dkk. (2016), Danuta (2016), Danuta (2017), Akbar dkk. (2019), Lintang Sari dkk. (2017), dan Nugroho dkk. (2015) yang menyatakan bahwa Implementasi e-procurement berpengaruh negatif signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Romaisah, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-procurement tidak berpengaruh signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penelitian Faisal, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya fraud dikarenakan terdapat tahap-tahap pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan. Implementasi sistem e-procurement masih belum dapat mengurangi terjadinya Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, meskipun penerapan e-procurement meningkatkan transparansi proses pengadaan, pelaku fraud masih dapat memanfaatkan keterbatasan sistem yang pada akhirnya masih memungkinkan terjadinya praktik korupsi atau fraud.

Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Karnay & Maria Fatimah (2022) bahwa pengadaan elektronik hanya alat untuk memodernisasikan penipuan jika tidak adanya akuntabilitas dan transparansi. Transparansi layanan pemerintah akan menurunkan persepsi terjadinya korupsi, namun penerapan e-Procurement belum sepenuhnya maksimal, terdapat

beberapa faktor yang belum dilaksanakan secara maksimal seperti perlunya tambahan tenaga kerja yang terampil mengoperasikan e-Procurement, peningkatan infrastruktur serta adanya dukungan penuh dari lembaga yang terkait. Tidak maksimalnya pelaksanaan penerapan e-Procurement akan menimbulkan gap antara desain yang telah direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai, hal ini menjadikan korupsi pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu yang paling banyak terjadi.

Penerapan sistem e-procurement diduga belum optimal sehingga belum mampu menekan peluang terjadinya fraud dalam proses pengadaan barang/jasa. Belum optimalnya penggunaan e-procurement dalam mencegah tindakan fraud bisa diakibatkan beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan di setiap tahapan pengadaan, keterbatasan pengetahuan pengoperasian sistem, serta kendala jaringan/server yang dapat membuka peluang untuk melakukan fraud. Selain itu, hal tersebut dapat dimungkinkan karena persaingan yang terjadi di antara penyedia barang/jasa belum sepenuhnya sehat meskipun telah diterapkan sistem e-procurement sehingga hal ini dapat membuka celah terjadinya fraud, informasi yang ditampilkan pada sistem e-procurement kurang informatif atau bahkan multi tafsir sehingga mengharuskan penyedia barang dan/atau jasa yang mengikuti tender untuk menghubungi pihak berwenang (panitia tender atau UKPBJ/LPSE terkait) dimana kegiatan bertukar informasi ini rentan sekali memicu terjadinya fraud.

Kurang optimalnya sistem e-procurement juga dimungkinkan karena terbatasnya pengetahuan tentang IT dalam pengoperasian sistem atau adanya kendala teknis seperti jaringan/server error mendorong penyedia/pengguna datang langsung ke UKPBJ/LPSE untuk meminta bantuan dalam prosesnya dimana hal tersebut dapat memberikan peluang “orang dalam” melakukan intervensi dan membuka celah terjadinya fraud. Keterbatasan pengetahuan dan awareness para aparatur sipil pengadaan barang /jasa terkait fraud dikarenakan kurangnya edukasi dari pimpinan turut serta membuka peluang terjadinya fraud.

Apabila kendala-kendala di atas tidak dapat teratasi dengan baik, maka penerapan sistem e-procurement tidak akan optimal dan sulit membantu upaya pemerintah dalam pencegahan fraud.

Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan sistem e-procurement. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem e-katalog dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya korupsi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya mengoptimalkan penerapan e-procurement sehingga dapat membantu upaya pencegahan fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan pengawasan. LKPP perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh LKPP, maupun secara eksternal oleh aparat penegak hukum, lembaga independen, maupun masyarakat.

- 2) Meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum perlu ditingkatkan kepada penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pelatihan, seminar, maupun sosialisasi melalui media massa.
- 3) Mengembangkan sistem e-procurement. LKPP perlu mengembangkan sistem e-procurement untuk dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, sistem e-procurement juga perlu dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-values sebesar $0,000 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $4,928 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai original sample) sebesar $-0,657$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y1). Hal ini berarti H2 diterima yang menunjukkan bahwa hasil tersebut sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Komitmen yang tinggi oleh pegawai pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat menekan terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pegawai pengadaan barang/jasa merasa ikut memiliki organisasi di tempat atau instansinya bekerja. Tingginya rasa memiliki tersebut mencerminkan komitmen pegawai yang besar sehingga mereka tidak akan bertindak/melakukan kecurangan (fraud) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa karena merasa telah menjadi bagian dari organisasi. Hal tersebut senada dengan penelitian sebelumnya oleh Natasya (2017) dan Purwitasari (2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berarti bahwa semakin besar komitmen pegawai pada organisasinya maka dapat menekan tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.. Pegawai yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan bekerja dan mengambil tindakan untuk kepentingan organisasi sehingga tidak akan timbul tindakan yang merugikan organisasi.

Temuan penelitian ini mendukung teori triangle fraud yang berpandangan bahwa dengan adanya komitmen terhadap organisasi maka akan mampu mengatasi masalah kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Pegawai yang berkomitmen terhadap organisasinya, apapun yang menjadi masalah internal dalam dirinya seperti tekanan akan kebutuhan, sikap rasionalisasi maka akan dapat dicegah dengan komitmen terhadap organisasi yang ada dalam dirinya. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tidak akan memanfaatkan peluang (opportunity) untuk melakukan tindakan kecurangan, karena pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya terus meningkatkan komitmen organisasi dengan baik agar dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan reward and punishment dimana kebijakan tersebut dapat meningkatkan loyalitas pegawai terhadap instansi terkait, menerapkan kebijakan pegawai mengambil peran/berpartisipasi untuk memberikan saran dan/atau masukan dalam proses pengambilan keputusan dimana hal ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan keterikatan pegawai terhadap instansi terkait serta dengan membuat pakta integritas yang berisikan komitmen pegawai untuk melaksanakan seluruh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan dengan baik serta pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran (goals) instansi terkait.

Pengaruh Implementasi e-Procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-values sebesar $0,004 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $2,652 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai original sample) sebesar $-0,366$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal signifikan memperlemah pengaruh Implementasi e-Procurement (X1) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y1). Hal ini berarti H3 ditolak yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh antara Implementasi e-Procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitadewi (2012) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi terjadinya pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nurlina dkk. (2018) yang menyatakan variabel pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan pada deteksi kecurangan (fraud), Asrifah (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan, dan penelitian Adi dkk. (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud.

Tidak berpengaruhnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam memoderasi hubungan antara Implementasi e-procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimungkinkan karena belum optimalnya penerapan SPIP pada instansi terkait diantaranya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh aktivitas operasional pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik belum dilaksanakan secara optimal, lingkungan pengendalian belum terbentuk dengan baik, dan penilaian resiko (identifikasi dan analisis resiko) oleh LKPP belum dilakukan secara optimal sehingga dapat memberikan celah/membuka peluang bagi oknum pegawai untuk melakukan fraud.

Firda Millatina

SPIP Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

Fraud yang terjadi secara berulang-ulang menunjukkan adanya indikasi lemahnya unsur pengendalian intern yang disebabkan kompetensi yang masih belum memadai, baik itu pada aparat pelaksana teknis pemerintah ataupun aparat pengawas intern pemerintah. Untuk itu perlu adanya dukungan dari seluruh unsur pemerintahan, terutama sekali dimulai dari pihak pimpinan guna mendukung peningkatan kompetensi dan sumber daya pengelola pemerintahan pada unit pelaksana teknis dan unit pengawasan intern pemerintah. Usaha peningkatan ini dimulai dari proses perekrutan PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan untuk peningkatan pengetahuan & keahlian, serta dukungan terhadap peningkatan sarana keterampilan dan pengalaman aparatur pemerintahan

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan penilaian resiko secara mendalam serta terus mengupdate sistem yang berlajutan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya fraud. Selain itu, temuan ini juga berimplikasi untuk pengambil kebijakan agar pencegahan tindak kecurangan pengadaan barang dan jasa (legal framework, transparent procedure, opening tender documents, evaluation in offer, delegation of authority) dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pelaku pengadaan. Aparat pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan kebijakan yang lebih peka terhadap isu masyarakat, jujur dan bertanggung jawab. Sistem Pengendalian Internal perlu ditingkatkan dengan mengedepankan etichal cultur dan pelaksanaan pengendalian pada aspek kegiatan penilaian (kebijakan dan prosedur), informasi serta komunikasi (desain dalam operasi yang dijalankan).

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-values sebesar $0,001 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $3,165 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai original sample) sebesar 0,417 menunjukkan arah positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal signifikan memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y1). Hal ini berarti H4 diterima yang menunjukkan bahwa hasil tersebut sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh antara Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitadewi (2012). Hubungan Pengendalian Internal dan Komitmen organisasi sangat berkaitan dimana dengan adanya pengendalian internal dan menanamkan rasa komitmen terhadap organisasi, maka hal tersebut dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak kecurangan salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat dalam bekerja dan didorong dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) diterapkan dengan baik, maka akan mencegah terjadinya tindak kecurangan terutama dalam pengadaan barang/jasa.

Firda Millatina

SPIP Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten)

Instansi pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan sistem terintegrasi dimana seluruh pegawai pada instansi pemerintah terkait wajib untuk mentaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan kepada masing-masing pegawai. Dengan kata lain, pegawai yang menjadi sampel penelitian ini seharusnya sudah mentaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang telah dimandatkan kepada masing-masing pegawai sehingga akan meminimalisir peluang terjadinya Fraud.

Dalam penerapan SPIP, komitmen organisasi sangat diperlukan sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hal perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan bisa dilaksanakan semua pihak.

Pengaruh Fraud Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-values sebesar $0,000 < 0,05$, dengan T-Statistics sebesar $8,602 > 1,647$ dan nilai koefisien (nilai original sample) sebesar $-0,615$ menunjukkan arah negatif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y1) berpengaruh negatif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y2). Hal ini berarti H5 diterima yang menunjukkan bahwa hasil tersebut sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2019), Pradnyani (2014) dan Riantirno (2011) yang menyimpulkan bahwa bahwa semakin rendah tingkat kecurangan yang terdapat pada organisasi, akan semakin tinggi tingkat akuntabilitas pada organisasi. Tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi tentu akan mengurangi akuntabilitas organisasi. Fraud membawa desakan/tuntutan bagi pemerintah selaku agen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan (public governance) yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah (Andari, 2020). Menurut Widiastuti (2019) pencegahan kecurangan atau fraud akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, dengan adanya komitmen Anti Fraud atau kecurangan dari seluruh elemen maka kinerja terus meningkat dan menjaga akuntabilitas.

Instansi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik memberikan jaminan/dapat dipastikan bahwa instansi tersebut melakukan kegiatan operasinya secara efisien, efektif dan responsif pada kehendak/keinginan masyarakat. Lingkungan kerja yang kondusif dengan potensi terjadi fraud rendah mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Dengan kata lain, instansi pemerintah yang mampu menutup celah/menekan peluang seseorang untuk melakukan fraud maka akan membantu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan peluang terjadinya fraud rendah sehingga mampu memiliki akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, simpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Implementasi e-Procurement berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. (2) Komitmen Organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. (3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah signifikan memperlemah pengaruh Implementasi e-Procurement terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. (4) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah signifikan memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. (5) Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Saran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten perlu meningkatkan optimalisasi penggunaan e-Procurement melalui pelatihan teknis, penguatan sistem keamanan digital, serta evaluasi berkala untuk memastikan transparansi dan keandalan proses pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis faktor-faktor penentu kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa dengan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81.
- Andari, M. W. (2020). Pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan fraud [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Asrifah, U. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta].
- Danuta, K. (2017). Crowe's fraud pentagon theory dalam pencegahan fraud pada proses pengadaan melalui e-procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Dewi, K. F., Putra, A., & Astika, I. (2017). Pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Gianyar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(1), 21–33.
- Natasya, T. N. (2017). Pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian internal terhadap resiko terjadinya kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Sulut. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 847–856.
- Nugroho, R., Wanto, A., & Trisnawati. (2015). Pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1905–1911.
- Nurlina, D., Falah, S., & Asnawi, M. (2018). The effect of procurement system and internal control system on accountability of instant performance in preventing fraud. *International Journal of*
-

Firda Millatina

Spip Peran Dalam Peningkatan E-Procurement Dan Komitmen Organisasi Untuk Kurangi Fraud Pengadaan (Banten

Business and Management Invention, 9(4), 29–39.

Putra, E. A. M., Hamdani, F., Fauzia, A., & Kusumawarni, B. A. (2024). Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel. *Lex Renaissance*, 9(1), 179–202.

Puspitadewi. (2012). Hubungan keadilan organisasional dan kecurangan pegawai dengan moderating kualitas pengendalian internal. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*, 2(2), 159–172.

Purwitasari, A. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi dalam pencegahan fraud pengadaan barang (Survei pada 5 rumah sakit di Bandung) [Skripsi, Universitas Widyatama].

Romaissah, Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2019). Pengaruh implementasi sistem e-procurement dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Neraca*, 65–80.

Sugiyono. (2012). *Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 136–171.

Wibowo, R. A. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. Ugm Press.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).